

PEMBELAJARAN SEJARAH SEBAGAI PRAXIS EMANSIPATORIS: PENDEKATAN PEDAGOGI KRITIS DAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

Yuda Ariwinata

Universitas Negeri Padang

Email: yudaariwinata@gmail.com

Diserahkan : 12 Maret 2026

Dipublikasikan : 21 April 2026

Abstrak

Artikel ini bertujuan merekonstruksi pembelajaran sejarah sebagai praksis emansipatoris melalui integrasi pedagogi kritis dan perspektif ekonomi kerakyatan dalam kerangka keadilan sosial. Studi ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan pembelajaran sejarah yang masih bersifat transmisif dan kurang memberikan ruang analisis terhadap relasi kuasa, distribusi sumber daya, serta dinamika ekonomi-politik yang membentuk perjalanan bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis kritis terhadap literatur internasional dan nasional yang relevan dalam bidang pendidikan sejarah, pedagogi kritis, dan ekonomi-politik pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi prosedural tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi ekonomi, sehingga pembelajaran sejarah perlu mengintegrasikan analisis struktur distribusi, kepemilikan, dan partisipasi sosial dalam setiap fase perkembangan historis. Artikel ini merumuskan model operasional pembelajaran sejarah berbasis pedagogi kritis dan ekonomi kerakyatan yang mencakup empat dimensi utama: analisis struktur, kontekstualisasi lokal, dialog kritis, dan orientasi demokrasi ekonomi. Model ini berkontribusi secara teoretik dengan mempertemukan kajian pendidikan sejarah dan ekonomi-politik pembangunan, serta secara praktis menawarkan kerangka kurikuler yang mendorong literasi demokrasi substantif. Dengan demikian, pembelajaran sejarah diposisikan sebagai medium transformasi sosial yang berorientasi pada perwujudan keadilan sosial dalam konteks Indonesia kontemporer.

Kata kunci: Pembelajaran Sejarah; Pedagogi Kritis; Ekonomi Kerakyatan; Demokrasi Ekonomi; Keadilan Sosial

Abstract

This article aims to reconstruct history education as an emancipatory praxis through the integration of critical pedagogy and a people-centered political economy perspective within the framework of social justice. The study is grounded in the concern that history instruction in Indonesia remains predominantly transmissive and insufficiently engages students in analyzing power relations, resource distribution, and the political-economic dynamics shaping national development. Employing a qualitative library-based approach, this research critically examines relevant international and national scholarship in history education, critical pedagogy, and political economy. The findings indicate that procedural democracy does not automatically lead to economic democracy, highlighting the need for history education to incorporate structural analysis of distribution, ownership, and social participation across historical periods. The article formulates an operational model of history learning based on four integrative dimensions: structural analysis, local contextualization, critical dialogue, and democratic economic orientation. The proposed model contributes theoretically by bridging history education studies and political economy discourse, while practically offering a curricular framework that fosters substantive democratic literacy. Ultimately, history education is positioned not merely as the transmission of collective memory but as a transformative medium aimed at advancing social justice in contemporary Indonesia.

Keywords: History Education; Critical Pedagogy; People-Centered Economy; Economic Democracy; Social Justice

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia merupakan persoalan struktural yang belum sepenuhnya teratasi dalam dua dekade terakhir. Data resmi Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rasio Gini Indonesia mencapai titik tertinggi pada September 2014 sebesar 0,414 dan meskipun mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, pada September 2023 masih berada pada angka 0,388 (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka tersebut menandakan bahwa distribusi pengeluaran nasional masih berada dalam kategori ketimpangan menengah dan mencerminkan adanya disparitas struktural antarwilayah, antarkelompok sosial, dan antarakses pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak dapat diposisikan sebagai institusi netral yang berdiri di luar dinamika sosial, melainkan sebagai arena yang terlibat dalam reproduksi maupun transformasi struktur ketimpangan tersebut. Pembelajaran sejarah, sebagai medium pembentukan kesadaran kolektif dan identitas nasional, memiliki posisi strategis dalam menentukan bagaimana generasi muda memahami relasi kuasa, pembangunan ekonomi, dan gagasan keadilan sosial.

Namun demikian, praktik pembelajaran sejarah di Indonesia masih didominasi pendekatan naratif-reproduktif yang menekankan kronologi peristiwa dan hafalan faktual. Model ini cenderung menempatkan peserta didik sebagai penerima pengetahuan yang telah dibakukan, alih-alih sebagai subjek epistemik yang aktif mengkonstruksi dan menguji makna sejarah. Kajian Santiago dan Dozono (2022) menegaskan bahwa penyelidikan historis pada hakikatnya bersifat kritis karena menuntut analisis sumber, evaluasi bukti, dan kesadaran terhadap konstruksi narasi. Dengan demikian, pemisahan antara ketelitian historis dan pedagogi kritis merupakan dikotomi yang tidak produktif. Sejalan dengan itu, Reisman (2020) menunjukkan bahwa *critical historical inquiry* memungkinkan integrasi antara kompetensi pedagogis dan kejelasan ideologis, sehingga peserta didik tidak hanya memahami fakta, tetapi juga mengidentifikasi asumsi normatif yang menyertainya.

Penelitian Hemmler et al. (2021) memperlihatkan bahwa strategi *scaffolding* dalam pembelajaran sejarah secara signifikan meningkatkan kemampuan pengambilan perspektif jamak (*multiple perspective-taking*), yang merupakan fondasi literasi demokratis. Perspektif ini penting dalam masyarakat plural seperti Indonesia, di mana narasi sejarah yang eksklusif berpotensi memperkuat polarisasi identitas. Barton dan Levstik (2004) menegaskan bahwa tujuan pendidikan sejarah bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi pembentukan orientasi terhadap *the common good*. Artinya, pembelajaran sejarah memiliki dimensi normatif yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap keadilan.

Secara teoritis, landasan pembelajaran sejarah sebagai praksis emansipatoris dapat ditelusuri pada pedagogi kritis yang dikembangkan oleh Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed*. Freire (2000) mengkritik pendidikan gaya “bank” yang mereproduksi struktur dominasi melalui transmisi pengetahuan satu arah. Pendidikan dialogis yang ia tawarkan bertujuan membangun *conscientização*, yakni kesadaran kritis terhadap kondisi historis dan material yang membentuk realitas sosial. Dalam konteks Indonesia, pembacaan sejarah kolonialisme, pembangunan Orde Baru, hingga liberalisasi ekonomi pasca reformasi perlu ditempatkan dalam analisis relasi kuasa dan dinamika ekonomi-politik, bukan sekadar sebagai rangkaian peristiwa kronologis.

Relevansi dimensi ekonomi dalam pembelajaran sejarah diperkuat oleh temuan Fossati (2021) yang menunjukkan bahwa identitas nasional memiliki korelasi signifikan dengan sikap publik terhadap globalisasi ekonomi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa konstruksi narasi sejarah berpengaruh terhadap orientasi ekonomi generasi muda. Jika pembelajaran sejarah tidak mengintegrasikan analisis ketimpangan struktural dan alternatif pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan, maka ia berpotensi memperkuat kesadaran yang adaptif terhadap sistem yang timpang. Sebaliknya, pembelajaran sejarah yang reflektif dapat membuka ruang diskusi mengenai arah pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Orientasi ini memiliki legitimasi normatif dalam kerangka negara. Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menegaskan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran sejarah tidak hanya memiliki mandat akademik, tetapi juga mandat konstitusional untuk berkontribusi pada transformasi sosial.

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis konseptual-kritis terhadap literatur internasional dan nasional yang relevan dengan pedagogi kritis, pendidikan sejarah, keadilan sosial, dan ekonomi kerakyatan. Sumber data terdiri atas artikel jurnal bereputasi internasional, publikasi kebijakan resmi, serta literatur teoretis yang dianalisis menggunakan teknik *thematic analysis* untuk mengidentifikasi relasi konseptual antara pembelajaran sejarah, struktur ketimpangan, dan orientasi normatif pendidikan. Pendekatan ini dipilih untuk merumuskan model konseptual pembelajaran sejarah sebagai praksis emansipatoris yang kontekstual dengan realitas Indonesia sekaligus relevan dalam diskursus akademik internasional.

Berdasarkan kerangka konseptual dan konteks empiris tersebut, artikel ini menganalisis tiga pokok persoalan utama. Pertama, bagaimana pedagogi kritis dan pendekatan *historical inquiry* dapat merekonstruksi pembelajaran sejarah dari model transmisif menjadi praksis dialogis-emansipatoris. Kedua, bagaimana integrasi perspektif ekonomi kerakyatan dalam pembelajaran sejarah dapat membangun kesadaran kritis terhadap ketimpangan struktural dan arah pembangunan nasional. Ketiga, bagaimana rekonstruksi tersebut memiliki relevansi normatif dalam kerangka konstitusi Indonesia dan agenda keadilan sosial. Ketiga persoalan ini akan dibahas secara sistematis pada bagian pembahasan sebagai dasar perumusan model konseptual pembelajaran sejarah yang berorientasi pada transformasi sosial.

PEMBAHASAN/DISCUSSION

Rekonstruksi Epistemologis Pembelajaran Sejarah Berbasis Historical Inquiry dan Pedagogi Kritis

Pembelajaran sejarah dalam banyak konteks pendidikan modern masih dibangun di atas paradigma epistemologis yang positivistik dan transmisif. Sejarah diposisikan sebagai kumpulan fakta objektif yang telah final, menunggu untuk ditransfer dari guru kepada peserta didik. Model ini mengandaikan bahwa pengetahuan historis bersifat stabil, netral, dan bebas nilai. Dalam praktiknya, pembelajaran cenderung berorientasi pada kronologi peristiwa, hafalan tokoh, dan reproduksi narasi nasional yang telah dilegitimasi oleh negara. Paradigma tersebut tidak hanya menyederhanakan kompleksitas sejarah, tetapi juga menutup ruang refleksi kritis terhadap relasi kuasa yang membentuk konstruksi pengetahuan sejarah itu sendiri.

Kajian Santiago dan Dozono (2022) secara tegas menolak dikotomi antara ketelitian akademik sejarah dan pedagogi kritis. Mereka menunjukkan bahwa *historical inquiry* pada dasarnya bersifat kritis karena menuntut evaluasi sumber, analisis konteks produksi dokumen, serta kesadaran terhadap posisi sosial penulis sejarah. Dengan demikian, objektivitas dalam sejarah bukanlah kondisi bebas nilai, melainkan hasil dari prosedur argumentatif yang terbuka terhadap kritik. Perspektif ini menggugat asumsi bahwa pembelajaran sejarah harus “netral” dalam arti depolitisasi.

Dalam kerangka yang lebih luas, Reisman (2020) menekankan bahwa *critical historical inquiry* memungkinkan integrasi antara *pedagogical content knowledge* dan kejelasan ideologis. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi asumsi normatif, bias sumber, serta kepentingan politik yang

melekat dalam narasi sejarah. Dengan demikian, kelas sejarah menjadi ruang deliberatif di mana makna masa lalu dinegosiasikan melalui argumentasi berbasis bukti.

Dominasi pendekatan transmisif juga berdampak pada pembentukan kesadaran historis (*historical consciousness*). Ketika sejarah dipresentasikan sebagai narasi tunggal dan heroik, peserta didik cenderung menginternalisasi identitas nasional secara ahistoris dan tidak problematik. Barton dan Levstik (2004) mengingatkan bahwa tujuan pendidikan sejarah bukan sekadar akumulasi informasi, tetapi pembentukan orientasi etis terhadap *the common good*. Tanpa proses refleksi kritis, sejarah kehilangan fungsi normatifnya sebagai sarana pembelajaran demokratis.

Dari perspektif pedagogi kritis, model transmisif mencerminkan apa yang oleh Paulo Freire disebut sebagai pendidikan “gaya bank” dalam *Pedagogy of the Oppressed*. Pengetahuan diperlakukan sebagai deposito yang ditanamkan oleh guru ke dalam diri siswa. Struktur ini mereproduksi relasi hierarkis dan membatasi partisipasi dialogis. Dalam konteks pembelajaran sejarah, konsekuensinya adalah reproduksi narasi dominan tanpa ruang untuk problematisasi ketimpangan sosial, konflik kelas, atau dinamika ekonomi-politik.

Sebaliknya, pendekatan *historical inquiry* menempatkan peserta didik sebagai peneliti pemula yang terlibat dalam proses interpretasi. Hemmler et al. (2021) menunjukkan bahwa strategi *scaffolding* dalam pembelajaran sejarah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami perspektif yang berbeda dan membangun argumen berbasis bukti. Kemampuan ini merupakan prasyarat bagi literasi demokratis dan partisipasi publik yang rasional. Dengan demikian, transformasi epistemologis pembelajaran sejarah memiliki implikasi langsung terhadap kualitas demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, dekonstruksi epistemologis ini menjadi penting karena sejarah nasional sering kali diajarkan melalui narasi pembangunan yang linier dan teleologis. Narasi tersebut cenderung menekankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi tanpa secara memadai mengulas ketimpangan struktural atau konflik sosial yang menyertainya. Padahal, data ketimpangan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa disparitas sosial masih menjadi persoalan serius (Badan Pusat Statistik, 2024). Ketika fakta empiris ini tidak diintegrasikan dalam refleksi historis, pembelajaran sejarah berisiko terlepas dari realitas sosial kontemporer.

Transformasi epistemologis dari paradigma transmisif menuju *historical inquiry* kritis bukan sekadar perubahan metode mengajar, melainkan perubahan cara memahami hakikat pengetahuan sejarah. Sejarah harus dipahami sebagai konstruksi argumentatif yang terbuka terhadap reinterpretasi, bukan sebagai monumen naratif yang beku. Dengan landasan ini, pembelajaran sejarah dapat berfungsi sebagai ruang pembentukan kesadaran kritis yang memungkinkan peserta didik memahami keterkaitan antara masa lalu, struktur ekonomi-politik, dan agenda keadilan sosial.

Tabel 1 Perbandingan Paradigma Pembelajaran Sejarah Transmisif dan *Historical Inquiry* Kritis

Aspek	Paradigma Transmisif	Historical Inquiry Kritis
Hakikat Pengetahuan	Fakta objektif dan final	Konstruksi argumentatif berbasis bukti
Peran Guru	Otoritas utama penyampai narasi	Fasilitator dialog dan penyelidikan
Peran Siswa	Penerima pasif informasi	Subjek epistemik aktif

Fokus Pembelajaran	Kronologi dan hafalan	Analisis sumber dan multiperspektivitas
Dimensi Ideologis	Dianggap netral	Diakui sebagai arena relasi kuasa
Implikasi Sosial	Reproduksi narasi dominan	Pembentukan kesadaran kritis dan demokratis

Reorientasi Epistemik Pendidikan Sejarah dalam Struktur Ekonomi-Politik Kontemporer

Dalam dua dekade terakhir, perdebatan internasional mengenai pendidikan menunjukkan pergeseran signifikan: sekolah semakin diposisikan sebagai instrumen peningkatan daya saing ekonomi dibanding sebagai ruang pembentukan kesadaran publik. Orientasi berbasis performativitas, pengukuran, dan standardisasi telah membentuk lanskap pendidikan global. Ball (2016) menunjukkan bahwa logika neoliberal dalam pendidikan bekerja melalui mekanisme audit, komparasi, dan akuntabilitas yang menggeser orientasi pembelajaran dari refleksi kritis menuju pencapaian indikator terukur. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada pendidikan sains atau matematika, tetapi juga pada pendidikan humaniora, termasuk sejarah.

Dalam konteks tersebut, pendidikan sejarah menghadapi paradoks struktural. Di satu sisi, sejarah memiliki potensi untuk membongkar relasi kekuasaan dan mengkaji dinamika ekonomi-politik secara kritis. Di sisi lain, dalam sistem pendidikan yang semakin terdorong oleh logika efisiensi dan hasil kuantitatif, sejarah cenderung direduksi menjadi materi yang harus “dikuasai” untuk kepentingan evaluasi. Akibatnya, dimensi analitis dan reflektif melemah, sementara narasi faktual yang terstandar menjadi dominan.

Penelitian mutakhir dalam kajian pendidikan sosial menunjukkan bahwa kurikulum seringkali berfungsi sebagai perangkat stabilisasi ideologis dalam masyarakat yang mengalami ketimpangan. Au (2018) mengemukakan bahwa kebijakan standardisasi kurikulum berkontribusi pada depolitisasi ruang kelas, karena materi disusun agar kompatibel dengan konsensus nasional tertentu. Dalam pendidikan sejarah, depolitisasi ini tampak melalui penyederhanaan konflik sosial dan pengurangan kompleksitas ekonomi-politik dalam narasi masa lalu.

Implikasi dari proses tersebut menjadi signifikan dalam masyarakat dengan sejarah pembangunan yang berlapis seperti Indonesia. Sejarah kolonialisme, industrialisasi, dan liberalisasi ekonomi bukan hanya rangkaian peristiwa, tetapi fondasi pembentukan struktur distribusi kekayaan kontemporer. Ketika pembelajaran sejarah tidak mengaitkan proses historis tersebut dengan konsekuensi sosial-ekonomi yang masih berlangsung, peserta didik kehilangan kemampuan untuk membaca kesinambungan struktural antara masa lalu dan masa kini.

Kajian mengenai pendidikan kewargaan kritis juga menunjukkan bahwa literasi demokratis tidak tumbuh secara otomatis melalui pengenalan institusi politik, melainkan melalui latihan analisis terhadap konflik kepentingan dan ketimpangan (Westheimer & Kahne, 2017). Pendidikan yang hanya menekankan kepatuhan prosedural menghasilkan warga negara yang patuh, tetapi tidak reflektif terhadap struktur. Dalam konteks pendidikan sejarah, risiko serupa muncul ketika narasi pembangunan tidak disertai analisis terhadap distribusi manfaat dan beban sosial.

Dimensi penting lainnya berkaitan dengan memori kolektif. Rüsen (2017) menegaskan bahwa kesadaran historis memiliki fungsi orientatif: ia menyediakan kerangka moral dan kognitif bagi individu dalam menghadapi realitas sosial. Apabila orientasi tersebut dibangun

di atas narasi yang tidak problematis terhadap struktur ketimpangan, maka sejarah berfungsi sebagai mekanisme legitimasi simbolik terhadap tatanan yang ada. Sebaliknya, ketika sejarah dipraktikkan sebagai ruang evaluasi terhadap kebijakan dan relasi kekuasaan, ia menjadi instrumen refleksi publik.

Dalam kerangka tersebut, pembelajaran sejarah perlu direposisi sebagai ruang analisis ekonomi-politik yang kontekstual. Pendekatan ini tidak berarti menjadikan sejarah sebagai propaganda ideologis, melainkan mengintegrasikan pembacaan terhadap dinamika produksi, distribusi, dan kebijakan ekonomi dalam setiap periode historis. Dengan cara demikian, peserta didik tidak hanya memahami kronologi perubahan, tetapi juga struktur yang membentuk perubahan tersebut.

Transformasi ini menuntut pergeseran dari pendekatan naratif menuju pendekatan struktural-analitis. Konflik agraria, kebijakan industrialisasi, privatisasi, serta integrasi pasar global dapat dianalisis sebagai bagian dari proses historis yang membentuk konfigurasi sosial-ekonomi saat ini. Pendekatan tersebut memperluas horizon pembelajaran sejarah dari sekadar identitas nasional menuju pemahaman tentang keadilan distributif dan demokrasi ekonomi.

Dengan demikian, tantangan utama pembelajaran sejarah bukan terletak pada kurangnya inovasi pedagogis semata, tetapi pada keberanian melakukan reorientasi epistemik dalam sistem pendidikan yang semakin terpengaruh logika pasar. Tanpa reorientasi tersebut, sejarah akan terus berfungsi sebagai arsip legitimasi. Dengan reorientasi tersebut, sejarah berpotensi menjadi ruang artikulasi kesadaran kritis terhadap struktur ekonomi-politik yang membentuk kehidupan sosial kontemporer. Bagian berikutnya akan mengembangkan secara sistematis bagaimana ekonomi kerakyatan dapat diartikulasikan sebagai kerangka interpretatif dalam pembelajaran sejarah untuk memperkuat dimensi keadilan sosial.

Integrasi Perspektif Ekonomi Kerakyatan dalam Kerangka Politik-Ekonomi Pembelajaran Sejarah

Pembahasan mengenai ekonomi kerakyatan dalam konteks pembelajaran sejarah memerlukan reposisi konseptual yang melampaui pendekatan normatif-konstitusional. Ekonomi kerakyatan tidak dapat direduksi menjadi prinsip moral pembangunan, tetapi harus dibaca sebagai kategori politik-ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, struktur kepemilikan, serta konfigurasi institusional yang membentuk relasi antara negara, pasar, dan masyarakat. Dalam kerangka ini, pembelajaran sejarah berpotensi menjadi ruang analisis terhadap dinamika kekuasaan ekonomi yang secara historis membentuk arah pembangunan Indonesia.

Literatur ekonomi-politik kontemporer menunjukkan bahwa demokratisasi tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi ekonomi. Winters (2013) menegaskan bahwa oligarki dapat beradaptasi dalam sistem demokrasi elektoral dengan mempertahankan kontrol atas sumber daya ekonomi strategis. Dalam konteks Indonesia pascareformasi, konsentrasi kekayaan dan pengaruh elite ekonomi tetap memainkan peran dominan dalam pembentukan kebijakan publik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sejarah politik Indonesia perlu dibaca bersamaan dengan sejarah distribusi ekonomi, bukan sebagai dua domain yang terpisah.

Analisis lebih lanjut mengenai konfigurasi ekonomi-politik Indonesia dikemukakan oleh Warburton (2016), yang menunjukkan bahwa orientasi pembangunan era kontemporer menampilkan kombinasi antara nasionalisme ekonomi dan keterbukaan pasar. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi selalu merupakan hasil negosiasi antara tekanan global dan kepentingan domestik. Dalam pembelajaran sejarah, dinamika tersebut penting untuk dikaji agar peserta didik memahami bahwa arah pembangunan nasional merupakan hasil kontestasi ideologis dan struktural, bukan sekadar respons teknokratis terhadap

kebutuhan pertumbuhan.

Lebih jauh, studi Hadiz (2017) menyoroti gejala kemunduran demokrasi substantif yang berkaitan dengan menguatnya politik identitas dan konsolidasi elite. Ketika demokrasi direduksi menjadi prosedur elektoral, persoalan distribusi kesejahteraan dan akses terhadap sumber daya publik cenderung terpinggirkan. Perspektif ini memperkuat urgensi pembelajaran sejarah yang mampu mengaitkan transformasi politik dengan dinamika ekonomi, sehingga demokrasi dipahami sebagai persoalan material sekaligus institusional.

Kajian mengenai klientelisme dan politik uang dalam demokrasi Indonesia juga menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi memiliki implikasi langsung terhadap kualitas representasi politik (Aspinall & Berenschot, 2019). Ketergantungan masyarakat pada patronase ekonomi memperkuat relasi hierarkis dan membatasi otonomi politik warga. Dalam konteks tersebut, ekonomi kerakyatan dapat dibaca sebagai kerangka analitis yang menekankan redistribusi akses ekonomi sebagai prasyarat partisipasi demokratis yang setara.

Dari perspektif pendidikan, hubungan antara globalisasi ekonomi dan kebijakan pendidikan turut membentuk orientasi kurikulum. Robertson dan Dale (2015) menjelaskan bahwa integrasi pendidikan dalam rezim ekonomi global sering kali mendorong logika kompetisi, performativitas, dan efisiensi pasar. Akibatnya, dimensi kritis dan reflektif pendidikan cenderung tereduksi. Apabila kecenderungan ini tidak dikritisi, pembelajaran sejarah berpotensi mereproduksi narasi pembangunan yang menormalisasi ketimpangan sebagai konsekuensi alamiah modernisasi.

Dalam konteks Indonesia, prinsip demokrasi ekonomi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 menyediakan basis normatif bagi pendekatan ekonomi kerakyatan. Namun, pembelajaran sejarah jarang memfasilitasi analisis kritis terhadap jarak antara prinsip konstitusional dan praktik kebijakan. Sejarah ekonomi Indonesia, mulai dari nasionalisasi aset pascakemerdekaan, pembangunan industri berbasis negara, hingga liberalisasi pasca reformasi, perlu dikaji sebagai rangkaian pergeseran paradigma pembangunan yang sarat kepentingan sosial dan politik.

Dengan demikian, ekonomi kerakyatan sebagai perspektif politik-ekonomi dalam pembelajaran sejarah memiliki tiga implikasi epistemik. Pertama, ia menggeser fokus dari pertumbuhan menuju distribusi dan akses. Kedua, ia menempatkan kebijakan ekonomi sebagai arena konflik kepentingan historis. Ketiga, ia mengintegrasikan dimensi konstitusional, struktural, dan sosial dalam analisis sejarah pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran sejarah bertransformasi menjadi medium refleksi kritis atas relasi antara kekuasaan ekonomi dan keadilan sosial, sehingga membuka ruang bagi praksis emansipatoris yang berakar pada analisis struktur, bukan sekadar reproduksi narasi nasional.

Formulasi Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Pedagogi Kritis dan Demokrasi Ekonomi

Rekonstruksi pembelajaran sejarah sebagai praksis emansipatoris menuntut artikulasi yang operasional, bukan sekadar konseptual. Integrasi pedagogi kritis dan ekonomi kerakyatan perlu ditransformasikan ke dalam desain pembelajaran yang mampu menghubungkan kesadaran historis dengan analisis struktur ekonomi-politik. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan ini menjadi semakin relevan mengingat sejarah nasional sarat dengan dinamika nasionalisasi, pembangunanisme negara, liberalisasi ekonomi, hingga konfigurasi oligarki kontemporer.

Literatur internasional menegaskan bahwa pendidikan kritis harus membuka ruang analisis terhadap struktur dominasi yang membentuk kehidupan sosial (Giroux, 2011). Dalam konteks Indonesia, struktur tersebut berkaitan erat dengan distribusi sumber daya, akses terhadap kebijakan publik, dan relasi negara–pasar yang historis. Warburton (2016) menunjukkan bahwa arah pembangunan Indonesia kontemporer merupakan hasil negosiasi

antara nasionalisme ekonomi dan tekanan globalisasi. Artinya, kebijakan ekonomi tidak netral, melainkan merefleksikan konfigurasi kepentingan yang dapat dianalisis secara historis dalam ruang kelas.

Sementara itu, Winters (2013) memperlihatkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia tidak secara otomatis menghapus konsentrasi kekayaan dan pengaruh elite ekonomi. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa pembelajaran sejarah perlu bergerak melampaui narasi prosedural demokrasi menuju analisis distribusi kekuasaan ekonomi. Di sinilah ekonomi kerakyatan memperoleh relevansi pedagogis sebagai perangkat analitis untuk membaca ketimpangan struktural secara historis.

Dalam konteks penelitian nasional, Maslahah dan Hidayat (2022) menunjukkan bahwa integrasi sejarah lokal dalam pembelajaran mampu memperkuat kesadaran sosial dan nilai perdamaian peserta didik. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa sejarah dapat dioperasionalkan sebagai medium refleksi sosial yang kontekstual. Integrasi ekonomi kerakyatan dapat dikembangkan melalui pendekatan serupa, yakni dengan menghadirkan studi kasus kebijakan ekonomi lokal atau dinamika distribusi sumber daya di tingkat daerah.

Selain itu, Hardika dan Maunah (2024) menegaskan pentingnya pemahaman histori pendidikan sebagai fondasi pembentukan kesadaran reflektif dalam sistem pendidikan nasional. Perspektif ini membuka ruang untuk membaca kurikulum sejarah bukan hanya sebagai instrumen transmisi narasi nasional, tetapi sebagai arena pembentukan orientasi ideologis terhadap pembangunan. Dengan demikian, pembelajaran sejarah berbasis ekonomi kerakyatan tidak berdiri di luar sistem pendidikan, melainkan merupakan penguatan terhadap fungsi reflektif pendidikan nasional.

Berdasarkan sintesis literatur internasional dan nasional tersebut, model operasional pembelajaran sejarah berbasis pedagogi kritis dan ekonomi kerakyatan dapat dirumuskan dalam empat dimensi integratif berikut:

Tabel 1. Model Operasional Pembelajaran Sejarah Berbasis Pedagogi Kritis dan Ekonomi Kerakyatan

Dimensi	Orientasi Teoretik	Strategi Implementasi	Dampak Transformasional
Analisis Struktur	Politik-ekonomi pembangunan dan distribusi sumber daya	Analisis kebijakan ekonomi historis (nasionalisasi, industrialisasi, liberalisasi)	Pemahaman relasi kuasa dalam sejarah ekonomi
Kontekstualisasi Lokal	Integrasi sejarah lokal dan pengalaman sosial	Studi kasus ekonomi daerah dan konflik distribusi	Kesadaran sosial berbasis konteks
Dialog Kritis	Pedagogi dialogis dan problem-posing	Diskusi berbasis dokumen kebijakan dan data ekonomi	Kemampuan argumentatif dan reflektif
Orientasi Demokrasi Ekonomi	Prinsip keadilan sosial dan Pasal 33 UUD 1945	Debat akademik tentang peran negara dan pasar	Literasi demokrasi substantif

Model ini menempatkan pembelajaran sejarah sebagai arena produksi kesadaran struktural. Peserta didik tidak hanya memahami peristiwa sejarah, tetapi mampu menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi membentuk pola distribusi kesejahteraan dan partisipasi politik. Dengan demikian, pedagogi kritis dan ekonomi kerakyatan berfungsi sebagai dua poros epistemik yang saling menguatkan: yang pertama membuka ruang refleksi terhadap relasi kuasa, sementara yang kedua menyediakan kerangka analitis mengenai distribusi dan keadilan sosial.

Integrasi ini menegaskan bahwa pembelajaran sejarah memiliki kapasitas untuk melampaui reproduksi identitas nasional menuju pembentukan kesadaran demokrasi ekonomi yang substantif. Transformasi tersebut menjadikan sejarah bukan sekadar memori kolektif, melainkan medium praksis emansipatoris yang berorientasi pada keadilan sosial dalam konteks Indonesia kontemporer.

SIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa pembelajaran sejarah di Indonesia perlu direkonstruksi sebagai praksis emansipatoris melalui integrasi pedagogi kritis dan perspektif ekonomi kerakyatan agar mampu melampaui pendekatan transmisif yang selama ini cenderung mereproduksi narasi nasional tanpa analisis struktural. Dengan membaca sejarah sebagai arena relasi kuasa yang membentuk distribusi sumber daya, kepemilikan, dan partisipasi politik, pembelajaran sejarah memperoleh fungsi epistemik yang lebih substantif, yakni membangun kesadaran kritis terhadap konfigurasi ekonomi-politik yang mempengaruhi kualitas demokrasi dan keadilan sosial. Sintesis literatur internasional dan nasional menunjukkan bahwa demokrasi prosedural tidak otomatis menjamin demokrasi ekonomi, sehingga pendidikan sejarah perlu menyediakan perangkat analisis untuk memahami ketimpangan, oligarki, serta kontestasi model pembangunan sebagai bagian dari dinamika historis. Model operasional yang dirumuskan dalam artikel ini yang mencakup analisis struktur, kontekstualisasi lokal, dialog kritis, dan orientasi demokrasi ekonomi menawarkan kontribusi teoritik dengan mempertemukan kajian pendidikan sejarah dan ekonomi-politik pembangunan, sekaligus kontribusi praktis bagi pengembangan kurikulum yang reflektif dan kontekstual. Dengan demikian, pembelajaran sejarah tidak lagi diposisikan sebagai reproduksi memori kolektif, melainkan sebagai ruang pembentukan literasi demokrasi substantif yang berorientasi pada transformasi sosial dan perwujudan keadilan sosial dalam konteks Indonesia kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAPHY

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501732997>
- Au, W. (2018). *A Marxist education: Learning to change the world*. Haymarket Books.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Gini ratio September 2023 sebesar 0,388* (Berita Resmi Statistik No. 05/01/Th. XXVII). <https://www.bps.go.id>
- Ball, S. J. (2016). Neoliberal education? Confronting the slouching beast. *Policy Futures in Education*, 14(8), 1046–1059. <https://doi.org/10.1177/1478210316664259>
- Barton, K. C., & Levstik, L. S. (2004). *Teaching history for the common good*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Fossati, D. (2021). National identity and public support for economic globalisation in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 61–84. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1747594>

- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum. (Original work published 1970).
- Giroux, H. A. (2011). On critical pedagogy. Continuum International Publishing Group.
- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's year of democratic setbacks: Towards a new phase of deepening illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261–278. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>
- Hardika, D. E., & Maunah, B. (2024). Dasar-dasar histori pendidikan di Indonesia. *Edudikara: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(2), 64–78. <https://doi.org/10.32585/edudikara.v8i2.336>
- Hemmler, V. L., Kibler, A. K., van Hover, S., Carlock, R. H., & Fitzpatrick, C. (2021). Using scaffolding to support CLM students' critical multiple perspective-taking on history. *Teaching and Teacher Education*, 103, 103349. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103349>
- Maslahah, W., & Hidayat, A. W. (2022). Indonesian history subject for peace education through the integration of local history. *Jurnal Kependidikan*, 8(1), 220–226. <https://doi.org/10.33394/jk.v8i1.4403>
- Peppin Vaughan, R. (2015). Education, social justice and school diversity: Insights from the capability approach. *Journal of Human Development and Capabilities*, 16(4), 499–516. <https://doi.org/10.1080/19452829.2015.1076773>
- Reisman, A. (2020). Critical historical inquiry: The intersection of ideological clarity and pedagogical content knowledge. *The Journal of Social Studies Research*, 44(1), 35–50. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2019.09.003>
- Robertson, S. L., & Dale, R. (2015). Towards a critical cultural political economy of the globalising of education. *Globalisation, Societies and Education*, 13(1), 149–170. <https://doi.org/10.1080/14767724.2014.967502>
- Rüsen, J. (2017). Evidence and meaning: A theory of historical studies. *Berghahn Books*.
- Santiago, M., & Dozono, T. (2022). History is critical: Addressing the false dichotomy between historical inquiry and criticality. *Theory & Research in Social Education*, 50(2), 173–195. <https://doi.org/10.1080/00933104.2022.2048426>
- Santiago, M., & Dozono, T. (2022). History is critical: Addressing the false dichotomy between historical inquiry and criticality. *Theory & Research in Social Education*, 50(2), 173–195. <https://doi.org/10.1080/00933104.2022.2048426>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Warburton, E. (2016). Jokowi and the new developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297–320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2017). What kind of citizen? Educating our children for the common good (2nd ed.). Teachers College Press.
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, 96, 11–33. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0011>

Cara Mengutip

PEMBELAJARAN SEJARAH SEBAGAI PRAXIS EMANSIPATORIS: PENDEKATAN PEDAGOGI KRITIS DAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. (2026). *Jurnal Persatuan Nasional*, 3(1). <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/24>

Lisensi

Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Persatuan Nasional



Artikel ini berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).